

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2000:1).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Tuntutan yang gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perjuangan untuk melakukan reformasi tersebut telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan seperti yang telah diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama dan sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah memberikan seperangkat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, untuk penerapannya khususnya dalam rangka pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif bagi instansi publik khususnya pemerintah daerah (LAN, 2000:2).

Selama ini baik pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah, walaupun secara prosedural telah ditentukan antara lain adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pencapaian sasaran kurang terorganisasi, terintegrasi dan tidak ada sinkronisasi satu sama lain.

Karena itu diperlukan suatu pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi, hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa instansi yang sukses dinilai atas